

INVESTASI PENDIDIKAN (Suatu Fungsi untuk Pendidikan yang Bermutu)

Oleh : Drs. H. Kasful Anwar.Us., M.Pd

Abstrak

Kecenderungan mahal biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah swasta, sekolah negeri pun secara terselubung tidak jauh berbeda, meski praktek bisnisnya tidak jelas terlihat. Dengan mahalnya biaya pendidikan adalah persoalan yang harus ditanggung bersama oleh masyarakat. Terlebih ketika jumlah angka kemiskinan masih tetap tinggi yang mengakibatkan negara semakin terbebani dengan penyediaan dana subsidi pendidikan. Jika saat ini jumlah penduduk miskin masih tinggi, maka biaya subsidi pendidikan yang dikeluarkan oleh negara tidak akan pernah dapat memenuhi keinginan seluruh masyarakat, sehingga secara otomatis tidak semua masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pendidikan secara merata, adil, dan layak. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui usaha pembangunan di bidang pendidikan, yaitu dengan menaikkan anggaran pendidikan, mengembangkan dan memperbaiki kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Akan tetapi, upaya tersebut pada kenyataannya -sampai saat ini- belum cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas sehingga membawa akibat pada rendahnya mutu pendidikan.

Kata Kunci: Mutu pendidikan, investasi pendidikan.

A. Pendahuluan

Selama ini, kebutuhan belajar selalu diidentikkan dengan bersekolah. Sekolah dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai satu-satunya lembaga yang sah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak. Akibatnya, masyarakat menjadi sangat tergantung terhadap sekolah, yang pada akhirnya membawa perubahan pada orientasi sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi sebuah lembaga bisnis.

Sebagai konsekuensi dari lembaga bisnis, akhirnya sekolah berlomba-lomba menarik konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam bentuk fasilitas, sarana belajar, dan manajemen pengelolaan yang memanjakan konsumen. Tujuannya tidak lain yaitu memberikan kepuasan pelayanan pada pelanggan, yaitu orang-orang yang mampu membeli jasa lebih. Akibat lebih jauh dari sistem pendidikan ini pembiayaan pendidikan menjadi semakin mahal dan tidak terkontrol.

Mengacu kepada pasal 31 UUD 1945 sebagai landasan operasional sistem pendidikan nasional, dimana tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan peluang yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan pengajaran yang layak tanpa membedakan status sosial, golongan dan asal daerah.

Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam konteks ini pelayanan pendidikan dipandang sebagai bagian dari *public service* atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat. Karenanya, pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian, artinya kedudukannya tidak mendapat perhatian yang menarik dalam gerak langkah pembangunan.

Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya (terutama sektor ekonomi). Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan di segala sektor.

Ketidak-yakinan ini terwujud dalam kecilnya komitmen anggaran untuk sektor pendidikan. Pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan dianggap buang-buang uang yang tidak bermanfaat. Akibatnya aplikasi anggaran sektor pendidikanpun biasanya merupakan sisa setelah yang lain terlebih dahulu.

Akan tetapi cara pandang ini sekarang sudah mulai tergeser dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor.

B. Menyoal Mutu Pendidikan

Edward Sallis dalam bukunya *Total Quality Management in Education* berpendapat bahwa mutu tidak hanya mengandung pengertian absolut sebagaimana banyak diterapkan oleh lembaga pendidikan sekarang. Mutu memiliki pengertian relatif yang dapat dijabarkan dalam dua aspek. *Pertama*, mutu yang menyesuaikan diri dengan spesifikasi yang telah dibuat oleh produsen (*quality in fact*). *Kedua*, mutu yang berupaya untuk senantiasa memenuhi keinginan konsumen/pelanggan (*quality in perception*) (Sallis, 2006).

Dalam konteks pendidikan, penjelasan tentang kualitas dengan menggunakan mutu berdasarkan pendekatan *quality in fact* dapat dilakukan

dengan mengukur kualitas siswa berdasarkan tingkat kemampuan kelulusan yang disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan sekolah berdasarkan kurikulum. Mutu pendidikan dinilai berdasarkan pada standar proses dan pelayanan yang disesuaikan dengan rencana kurikulum sekolah. Kemudian untuk pendekatan *quality in perception* kualitas pelayanan pendidikan diukur dari kemampuan kompetensi berdasarkan keinginan pelanggan yaitu kepuasan orang tua siswa, masyarakat lingkungan sekolah. Mutu pendidikan diasumsikan sebagai pemenuhan selera kebutuhan dari *stakeholders* dengan sebaik-baiknya. Jika *stakeholders* merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sekolah, maka proses pembelajaran dalam rangka mendidik siswa dapat dikatakan bermutu. Tentunya, keinginan pelanggan adalah keinginan yang senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Sebagai sebuah konsep yang *relative*, maka mutu merupakan ide yang dinamis. Mutu dapat dikatakan ada jika memenuhi spesifikasi sekaligus mendapat pengakuan dari konsumen/pelanggan. Pendidikan dalam konteks ini tidak harus mahal, akan tetapi lebih menekankan pada kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, menurut Sallis (2006) bahwa untuk menentukan standar mutu pendidikan adalah suatu hal yang sangat sulit karena keragaman dan kompleksitas peserta didik. Bahkan untuk menghasilkan pelajar dengan standar jaminan tertentu adalah suatu hal yang mustahil dapat diwujudkan.

Terkait dengan persoalan mutu pendidikan, Ace Suryadi (2001) juga berpendapat serupa bahwa mutu pendidikan hanya akan terwujud jika proses pendidikan di sekolah benar-benar menjadikan siswa mampu belajar dan belajar sebanyak mungkin. Mutu pendidikan harus dilihat dari meningkatnya kemampuan belajar siswa secara mandiri, tidak karena paksaan oleh guru atau orang.

Disamping itu, usaha peningkatan mutu pendidikan juga terkait erat dengan usaha pemberdayaan sekolah, guru, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki kurikulum, menambah buku pelajaran, dan menyediakan laboratorium di sekolah. Dengan kurikulum yang terstruktur secara ketat serta langsung dikendalikan dari pusat hanya akan membuat guru menyisir pokok bahasan satu per satu, yang disampaikan melalui ceramah. Kecenderungan untuk mengejar target kurikulum menjadikan siswa hanya berorientasi pada nilai (angka hasil belajar), bukan kemampuan dan keterampilan setelah belajar.

Karena mutu pendidikan bersifat mikro, pihak yang paling berperan adalah guru di sekolah. Guru paling mengetahui kemampuan anak orang-orang dan cara mengajar mana yang paling baik bagi mereka. Guru juga bisa meneliti dan mengkaji, misalnya, semangat dan prestasi belajar anak menurun, tidak bergairah, dan bagaimana membantu mereka belajar.

Berdasarkan pengalaman, guru bisa berinovasi, pendekatan mengajar yang mana untuk materi yang mana agar dapat membelajarkan siswa secara berhasil. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru perlu dukungan dari kepala sekolah. Peran kepala sekolah adalah mengelola sumber-sumber daya pendidikan, seperti buku, perpustakaan, biaya operasional, bantuan teknis, mengelola diskusi antar guru, agar dapat mendukung proses belajar siswa. Pemerintah (pusat dan daerah) berperan dalam menetapkan standar minimal kemampuan siswa serta ukuran keberhasilannya sebagai sasaran bagi guru untuk mencapainya, serta dasar akuntabilitas guru dan kepala sekolah terhadap masyarakat. Standar kemampuan siswa, standar sarana, dan standar prasarana belajar perlu ditetapkan pemerintah untuk menjamin agar tidak ada sekolah yang beroperasi di bawah standar minimum.

C. Konsep Pendidikan Sebagai Sebuah Investasi

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Menurut Nurulfalik (2004), Konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak zaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia.

Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika Theodore Schultz, yang merupakan peletak dasar teori *human capital* modern, berpidato dengan judul "*Investment in Human Capital*" di hadapan *The American Economic Association*. Pesan utama dari pidato tersebut sederhananya adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi.

Schultz (1961) dan Deninson (1962) kemudian memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan *interest* selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep "Revolusi Investasi Manusia di Dalam Pemikiran Ekonomis" Para peneliti lainnya seperti Deninson (1962), Becker (1969) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori *human capital* ini.

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi "leading sektor" atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

Menurut Sumara (2005), pada tahun 1970-an penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sempat mandeg karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Gary Becker (1964) yang mengatakan bahwa teori human capital lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya.

Kritik Becker justru membuka perspektif dari keyakinan filosofis bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan oleh sebab itu terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (*human dignity*).

Penelitian Hick (1980), Wheeler (1980), dan beberapa peneliti neoklasik lain, telah dapat meyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung bahkan seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya ke berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya. Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut (Nurulfalik, 12).

Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

D. Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang

Profesor Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang (Editorial KOMPAS, 24 Mei 2002).

Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Keputusan ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Menurut Nurkolis (2005), sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang :

1. Pendidikan Sebagai Alat Perkembangan Ekonomi

Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi ini merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara ekonomis.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), pendidikan *life skill* dan *broad based education* yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini (Tampubolon, 2005). Di Amerika Serikat (1992) seseorang yang berpendidikan doktor berpenghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpenghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama di Indonesia, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD/SMP hanya 1,1 juta rupiah.

Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter

ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya (McMahon dan Geske, 1982; 121).

Sumber manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

2. Nilai Balik Pendidikan

Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% berbanding 15%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Suryadi, 1999; 247).

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27%, pendidikan menengah 15% dan pendidikan tinggi 13%. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Oleh karena itu maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk perguruan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat

beberapa kajian menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan juga didasarkan pada kekuatan ekonomi peserta didik. Artinya peserta didik di PTN yang berasal dari keluarga kaya dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model ini sesuai dengan kriteria equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan UNESCO.

Itulah sebabnya Profesor Kinosita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu; *Learning to know, Learning to do, Learning to be dan Learning live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal, dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional harusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya benar-benar dibebaskan dari segala beban biaya. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

3. Fungsi Non Ekonomis Dalam Investasi Pendidikan

Investasi dalam pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis, yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.

Fungsi sosial-kemanusiaan; merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Cheng, 1996; 7).

Fungsi politis; merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya, pendidikan membentuk siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Fungsi budaya; merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Misanya, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya,

kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keaneka ragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.

Fungsi kependidikan; merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Misalnya, pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi / uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri (Nurkolis, 2005; 3).

E. Kesimpulan

Investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi yaitu perkembangan ekonomi. Selama Orde Baru kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde Baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar.

Perkembangan ekonomi akan tercapai bila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang lebih baik, berkualitas dan bermutu.

Iniilah saatnya bagi negeri ini untuk merenungkan bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pendidikan juga sebagai alat pemersatu bangsa yang saat ini sedang diancam perpecahan. Melalui fungsi-fungsi pendidikan di atas yaitu fungsi sosial-kemanusiaan,

Fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan maka negeri ini dapat dipersatukan kembali. Dari uraian di atas tampak bahwa pendidikan adalah wahana yang amat penting dan strategis untuk perkembangan ekonomi dan integrasi bangsa.

Investasi di bidang pendidikan merupakan suatu bentuk jaminan masa depan bangsa yang lebih baik. Memang tidak dapat secara langsung mengubah masa depan bangsa. Tentunya hal ini merupakan proses yang membutuhkan kesabaran dan keuletan sehingga mampu menciptakan insan-insan bangsa yang intelektual. Pendidikan bukan hanya sebagai sebuah bonafiditas tetapi di balik itu pendidikan menyimpan suatu kekayaan intelektual yang memiliki nilai yang tak terhingga. Singkatnya pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheng, Yin Cheong, 2003. *"School Effectiveness and School-Based Management: Mechanism for Development"*, Washington D.C: The Palmer Press.
- Editorial KOMPAS, 24 Mei 2005
- Sallis, Edward. (2006). *Total Quality Management In Education*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- McMahon, W.W., and T.G. Geske, 1982. *"Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity"*, USA University of Illinois.
- Nurkolis, 2005. *Investasi Sektor Pendidikan*, Artikel Pendidikan Network. <http://artikel.us/nurkolis5.html>
- Nurulfalik, I, 2004. *Pendidikan dan Investasi*, TEROPONG Suplemen PIKIRAN RAKYAT, Bandung, Edisi 05 April 2004.
- Sumara, I Ketut Anom, 2005. *Investasi Pendidikan*, Surat Pembaca BALI POST Edisi 17 April 2005
- Suryadi, Ace, 2006. *"Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori, dan Aplikasi"*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tampubolon, Mangatas, 2005. "Paradigma Baru Pendidikan Bermutu Berdasarkan Sistem Broad Based Education dan High Based Education Menghadapi Tantangan Abad ke-21 di Indonesia". Artikel dikelola Balitbang Dikdasmen Dikti, Depdiknas. <http://www.dikti.org/>